



Narasi Radikalisme-Terrorisme di Website Tahun 2022: Upaya Menumbuhkan Pemahaman Moderat

Hatim Gazali,¹ Muhammad Khoirul Anwar,² Syahril Mubarak³

¹Sampoerna University, ²Universitas PTIQ, Fakultas, ³Islamina.id

Hatim.ghazali@sampoernauniversity.ac.id¹

Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>

DOI:10.47776/mozaic.v10i1.1147

Naskah diterima: 15 Februari 2024

Naskah direvisi: 28 Maret 2024

Naskah disetujui: 23 April 2024

Naskah dipublish: 30 April 2024

Keywords *Narrative, Radicalism, Religious Moderation*

Kata Kunci *Narasi, Radikalisme, Moderasi Beragama*

Abstact

This study aims to analyze the radicalism-terrorism narrative on online media websites in 2022 as an effort to foster moderate understanding in accessing digital media. This research method was carried out using netnography. The results of research on indicators of radicalism found evidence that it was still high. Some of the narratives that were developed became the tendency of each media. This means that not all Islamic media are massively framing the caliphate issue. This fact was found based on searching through keywords on each website that was the object of research. For example, in the media eramuslim.com, the percentage of narratives framing the issue of the caliphate is still low when compared to other narratives.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai narasi radikalisme-terorisme yang ada di media online website pada tahun 2022 sebagai upaya dalam menumbuhkan pemahaman moderat dalam mengakses media digital. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan netnografi. Hasil penelitian indikator radikalisme menemukan bukti yang masih tinggi. Beberapa narasi yang dikembangkan menjadi kecenderungan masing-masing media. Artinya tidak semua media keislaman men-framing isu khilafah secara masif. Fakta ini ditemukan berdasarkan pencarian melalui kata kunci pada masing-masing website yang menjadi objek riset. Misalnya pada media eramuslim.com narasi yang men-framing isu khilafah prosentasenya masih rendah jika dibanding dengan narasi-narasi lain.

PENDAHULUAN

Global Terorisme Index tahun 2022 mencatat bahwa pada tahun 2021 meskipun terjadi peningkatan serangan, dampak terorisme terus menurun. Pada tahun 2021, kematian akibat terorisme turun 1,2% menjadi 7.142, sementara serangan meningkat 17%, menyoroti bahwa terorisme menjadi kurang mematikan (GTI, 2022). Indeks tersebut menunjukkan bahwa terorisme semakin terkonsentrasi, menyebar ke negara-negara yang sudah menderita konflik kekerasan. Zona konflik menyumbang 97% dari semua kematian. Sepuluh negara yang paling terkena dampak terorisme semuanya berada di zona konflik.

Yang kurang mendapat perhatian adalah terkait dengan narasi yang berkembang di kelompok radikal-teroris. Sebagai gunung es, narasi tersebut tak terlihat secara langsung, ukurannya lebih besar dari yang tampak (tindakan terorisme). Pasalnya, tindakan terorisme merupakan buah dari narasi dan ideologi. Catharina Savelkoul menyatakan bahwa teroris membutuhkan ideologi karena ideologi diperlukan untuk menentukan tujuan dan target yang menyeluruh, untuk memiliki pembenaran internal untuk serangan, dan, untuk organisasi teroris pada umumnya, untuk menarik sumber daya dan rekrutmen (Catharina, 2022).

Bagi teroris, ideologi secara khusus untuk: (1) mendefinisikan tujuan menyeluruh serta target yang sesuai, (2) memberikan pembenaran internal untuk pelaksanaan serangan, dan (3) untuk organisasi pada umumnya, menarik sumber daya dan merekrut. Teroris, dengan demikian, membutuhkan ideologi. Namun demikian, ideologi, salah satu konsep yang paling sulit dipahami dalam ilmu sosial (McLellan, 1995), karena itu Catharina Savelkoul—untuk mempermudah—memaknainya 'serangkaian gagasan politik yang berorientasi pada tindakan (Heywood, 2017). Dalam konteks inilah, mengkaji narasi radikalisme-terorisme menjadi sangat penting. Dengan memerhatikan narasi-narasi tersebut, maka dapat melihat narasi sekaligus aspirasi apa saja yang digunakan oleh kelompok radikal-teroris. Selanjutnya, negara dan kelompok-kelompok anti radikal-teroris dapat melakukan langkah-langkah penting untuk merespons, termasuk melakukan kontra narasi.

Salah satu cara termudah untuk mengkaji narasi-narasi yang digunakan oleh kelompok radikal-teroris ini adalah melalui media-media yang kerap menyuarakan narasi yang sama atau sejenis narasi kelompok radikal-terorisme. Tentunya, ada banyak media

baik berupa website maupun media sosial yang menyuarakan narasi radikal-teroris, yang tentunya tidak semuanya dapat dikaji dan dianalisis. Karena itu, Islamina memilih beberapa media yang konsisten menyuguhkan narasi radikalisme-terorisme.

Kategori radikalisme yang digunakan merujuk pada definisi bahwa radikalisme merupakan suatu paham atau sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem (Gazali, Anggraeni, & Eit Ahmed, 2023). Dari definisi tersebut maka bisa dikenali dengan jelas melalui beberapa indikator berikut: 1) intoleransi (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain). 2) memiliki sifat atau cara pandang yang fanatik (selalu beranggapan benar sendiri, sedangkan yang lain salah). Indikator ini digunakan untuk menganalisis konten narasi yang memiliki ciri pada gagasan satu arah (*one way*). Dalam konteks ini, mereka melakukan pengkafiran (narasi *takfir*) terhadap kelompok yang berlawanan. 3) bersikap eksklusif dengan merasa dirinya paling benar daripada umat Islam pada umumnya. 4) ujaran kebencian, penghasutan, dan permusuhan (*hate speech*) kepada kelompok yang dianggap berlawanan atau mengganggu misi mereka. 5) menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga narasi yang digunakan adalah kebolehan menggunakan jalur kekerasan untuk mencapai tujuan.

Lima indikator umum tersebut memang terjadi pada konten-konten yang diproduksi oleh media keislaman berbasis website dengan tujuan tertentu. Dalam laporan ini sistem pemaparan dimulai dengan mengelompokkan artikel sebagai *framing* media secara periodik setiap bulan mulai dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022 serta mengaitkan dengan isu yang berkembang pada saat bersamaan. Untuk memudahkan, redaksi Islamina menggunakan 12 kata kunci (*keyword*): khilafah, terorisme, Pancasila, kriminalisasi ulama, Jokowi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Radikalisme, Kafir, Jihad, Cina, Amerika, dan moderasi beragama.

Pemilihan 12 kata kunci tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi. Kata kunci “*Khilafah*” dan “*Jihad*” digunakan karena penegakan khilafah seringkali dijadikan justifikasi oleh kelompok radikal-teroris. Sasaran tembak dari penggunaan jihad tersebut ditujukan kepada kelompok yang dianggap kafir, karena itu kata kunci “*kafir*” merupakan kata kunci penting yang digunakan oleh Islamina.

Keterkaitan kata kunci “*khilafah*” dan “*jihad*” telah diulas dalam banyak artikel dan buku, seperti buku yang ditulis oleh Azyumardi Azra, dkk “*Jihad, Khilafah dan*

terorisme”. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kekeliruan memahami doktrin-doktrin kunci dalam Islam telah menjerumuskan sebagian kelompok dari umat ini melakukan aksi-aksi kekerasan dan teror dengan mengatasnamakan ajaran Islam (Azra, Kuswaya, Abbas, & Darraz, 2017). Konsep jihad yang selalu dimaknai secara sempit sebagai perang suci melawan kaum kafir, menjadi salah satu ajaran Islam yang paling sering disalah pahami sekaligus disalahgunakan dalam praktiknya. Namun demikian, Islamina sepenuhnya menyadari bahwa tidak semua kelompok yang mengulas tentang “khilafah” dan “jihad” dapat dikelompokkan sebagai kelompok radikal-teroris, karena bergantung kepada narasi, pemaknaan dan pemahaman terhadap kedua kata kunci tersebut. Karena itu, Islamina menganalisis narasi dan pemahaman terhadap kata kunci tersebut.

Di saat bersamaan, kata kunci terorisme, radikalisme dan yang berkaitan dengannya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme digunakan mereka untuk melakukan bantahan bahwa apa yang mereka lakukan bukan bagian dari terorisme dan radikalisme, melainkan bentuk jihad menegakkan syariat Islam (Azra, 2018). Selain itu, mereka juga membangun narasi bahwa tindakan teroris yang sebenarnya itu adalah dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena itulah, mereka membangun narasi kebencian kepada Amerika, termasuk juga kepada Cina.

Narasi kebencian dan penghasutan juga dilakukan oleh kelompok radikal-teroris kepada pemimpin negara seperti presiden yang dianggap sebagai *thagut*, karena itu kata kunci “Jokowi” sebagai presiden Republik Indonesia digunakan oleh Islamina. Termasuk juga kata kunci “Pancasila” yang dianggap lawan utama dari ideologi khilafah yang diusung oleh kelompok radikal-teroris, sehingga perlu dikaji. Moderasi beragama sebagai kontra narasi dari narasi yang dihembuskan oleh kelompok radikal-teroris juga penting untuk diamati untuk mengetahui bagaimana respons dan narasi kelompok radikal-teroris terhadap moderasi beragama (Gazali et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif netnografi, yaitu pendekatan yang memfokuskan pengamatan atau observasi kepada subjek yang berada pada lingkup internet. Menurut Kozinet, studi netnografi bisa memaksimalkan sekumpulan data besar yang bersumber dan dimanifestasikan melalui data yang dibagikan di internet (Tadulako, 2020) dengan menganalisis konten naratif berbasis website media keislaman. Spesifiknya melakukan pengumpulan data dari media-media keislaman

tertentu yang secara konsisten memproduksi konten naratif yang berindikasi pada paham radikal. Setelah data terkumpul dilakukan kajian analisis mendalam untuk membuat paparan yang tepat.

Teknisnya Islamina.id melakukan pantauan terhadap website keislaman yang menyebarkan narasi-narasi “radikalisme” selama tahun 2022. Kategori radikalisme yang digunakan oleh islamina.id merujuk pada teori radikalisme secara umum sebagai pisau analisis atas narasi yang disajikan website terkait. Selanjutnya islamina.id juga melakukan *tracing* untuk melacak pengelola website terkait yang menentukan kecenderungan memproduksi narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Website Dengan Narasi Pro Radikalisme-Terrorisme

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa ada banyak website dan media sosial yang mengusung narasi yang pro atau sesuai dengan narasi kelompok radikal-teroris. Namun



Namun demikian, Islamina membatasi hanya ke website-website yang

sampai saat ini cukup aktif, bukan ke media sosial. Beberapa di antaranya, sebagai berikut:

1. *Tintasiyasi.com*

Website ini merupakan produk dari eks-Hizbut Tahrir Indonesia. Portal media ini berisi rubrik-rubrik berita, politik, ekonomi, hukum, tsaqāfah, analisis, opini, khazanah, nafsiyah, motivasi, galeri dan sebagainya. Namun, muatan konten atau artikel berisi eksklusifitas yang menandai produk ideologi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia.

Visi dan misi media ini juga tercantum dalam website. TintaSiyasi.com memiliki visi-misi sebagai berikut: *Pertama*, menyajikan berita dan artikel Islami yang solutif dan informatif. *Kedua*, memproduksi konten-konten yang mendukung dakwah kekinian. *Ketiga*, menguasai media sosial untuk meningkatkan sebaran konten-konten yang telah diproduksi. Yang menarik, ada catatan bahwa media tersebut dipergunakan untuk memenangkan opini keislaman (dari segi politik). Dari hasil analisis yang dihimpun, banyak sekali *keywords* 'Khilafah' pada website TintaSiyasi.com. Sekitar 70% artikel juga menyinggung sistem demokrasi di Indonesia juga suatu hal yang menurut mereka salah.

Website ini juga mencantumkan kontak redaksi sebagai berikut: redaksitintasiyasi@gmail.com.

2. *eramuslim.com*

 Hampir sama dengan TintaSiyasi.com, Eramuslim.com juga memuat konten berdasarkan wacana narasi keislaman. Yang menjadi pembeda yakni artikel-artikel didominasi kritik destruktif. Sasarannya adalah pemerintah, kelompok Islam moderat, dan Non Muslim. Tidak banyak yang tercantum pada profil website ini. Hanya menjelaskan motto sebagai 'Media Islam Rujukan'. Eksistensi website ini sejak tahun 2012. Adapun eramuslim.com memiliki 11 rubrik dalam website antara lain: Berita, Oase Iman, Peradaban, Fokus, Muslimah, Hikmah, Pendidikan, Bisnis, Ustadz, Suara Langit, dan Konsultasi.

Pada tahun 2015, eramuslim.com sempat diblokir oleh pihak KEMENKOMINFO. Hal itu dikarenakan website bermuatan terorisme, SARA, dan kebencian. Namun, eramuslim.com dibuka kembali setelah pihak dari eramuslim.com bertemu dengan tim KEMENKOMINFO.

Hasil analisis yang dikumpulkan, banyak sekali artikel atau berita dari website ini menitikberatkan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, serta memainkan narasi keislaman.

3. *al-Waie.id*



Al-Waie.id hadir sebagai website keislaman dan mewarnai kondisi politik Indonesia. Hal yang difokuskan oleh website ini yaitu politik dan dakwah. Narasi yang ditampilkan al-waie.id juga cenderung provokatif.

Sejumlah 14 rubrik dalam website ini, diantaranya Rubrik Spesial, Kilas Dunia, Dunia Islam, Nisa, Iqtishadiyah, Telaah Kitab, Soal Jawab, Tsaqafah, Catatan Dakwah, Tafsir, Siyasah Dakwah, Ibrah, Tarikh, dan Afkar. Yang di-branding oleh website ini adalah bulletin.

Sebanyak 58 edisi bulletin dari awal kemunculan website ini. Narasi yang dibangun adalah sistem Khilafah Islamiyah harus diterapkan di Indonesia. Mulai dari penerapan agama secara *kaffah*, hingga mengubah realita politik di tanah air. Pada bagian bawah *layout* website, terdapat nama penerbit dan alamat redaksi al-waie.id

4. *buletinkaffah.com*



Produk yang ditampilkan oleh website ini adalah e-bulletin. Bulletin yang terbit setiap Jum'at ini konsisten mewarnai narasi keislaman baik secara online dan offline (disebar di masjid).

Selain bulletin, ada juga rubrik podcast dan audio.

Keduanya tidak menampilkan visual, hanya semacam suara yang membahas topik yang diangkat. Tampilan *layout* website sangat sederhana. Narasi yang dikembangkan oleh bulletin kaffah adalah antitesis tujuan mayoritas umat Islam di Indonesia. Contohnya seperti mereka menolak moderasi beragama, Islam Wasathiyah, terminologi al-Muwāthin, dan sebagainya.

5. *Suaraislam.id*



Suaraislam.id tampil sebagai portal media keislaman. Mengusung *tagline* "Memperjuangkan Aspirasi dan Hak-

hak Umat", suaraislam.id justru hanya menyuarakan kelompok tertentu. Awalnya, *Suara Islam* terbit dalam format cetak, yakni berupa tabloid. Terbit dan beredar pada Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Saat itu tabloid *Suara Islam* didistribusikan ke hampir semua provinsi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu kemudian dilahirkan pula dalam format digital *Suara Islam Online* dengan alamat: *www.suara-islam.com*. Saat itu konten *Suara Islam Online* mayoritas merupakan konten tabloid. *Suara-islam.com* kembali diluncurkan pada Kamis, 7 Maret 2013, di arena Islamic Book Fair (IBF) di Istora, Senayan, Jakarta.

Pada pertengahan 2019, *Suara Islam Online* berpindah domain, dari *suara-islam.com* menjadi *suaraislam.id*. Meskipun domain yang lama masih dimiliki. Kini *Suara Islam Online* bernaung di bawah Yayasan Media Suara Islam "YAMSI".

6. *Mediaumat.id*

Website mediaumat.id hadir sebagai salah satu narasi yang ditawarkan oleh eks-HTI. Selain tintasiasi dan lain-lain, mediaumat.id konsisten mengkampanyekan khilafah

MediaLumat

website ini di depan para muḥarrrik atau simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia. Dari segi tampilan website cukup mengesankan. Ada rubrik Nasional, Internasional, Kristologi, Editorial, dan Siyasah.



destruktif. Selain itu, website ini juga menyasar kelompok atau organisasi muslim moderat di Indonesia. Narasi-narasi yang dibentuk seperti ada upaya membenturkan antar umat Islam. Hasil analisis yang telah dihimpun, nahimunkar.org belum ada konfirmasi secara detail website ini milik perorangan atau bersama. Hanya saja dalam website ditampilkan info perorangan.

8. *Muslimahtimes.com*



Untuk Muslimah Masa Kini'. Tetapi, isi dari website tersebut dapat membawa mental pembaca untuk bersikap intoleran. Konten-konten dengan *market* muslimah banyak sekali diakses 5 tahun ke belakang. Kontestasi narasi ini juga dihadirkan oleh kelompok intoleran agar mampu menarik muslimah-muslimah dengan gairah tinggi untuk belajar agama. Dengan mudahnya akses melalui website, kalangan muslimah (rentang usia 20-30 tahun) mampu terpengaruh oleh muatan website.

Narasi Utama Website

Islamina melakukan pencarian berdasarkan kata kunci terhadap website-website tersebut. Dengan menggunakan 12 kata kunci di atas, ditemukan bahwa masing-masing

sebagai ajaran Islam yang tidak bisa dilupakan. Mengusung tema 'Memperjuangkan Kehidupan Islam', menjadi fakta bahwa

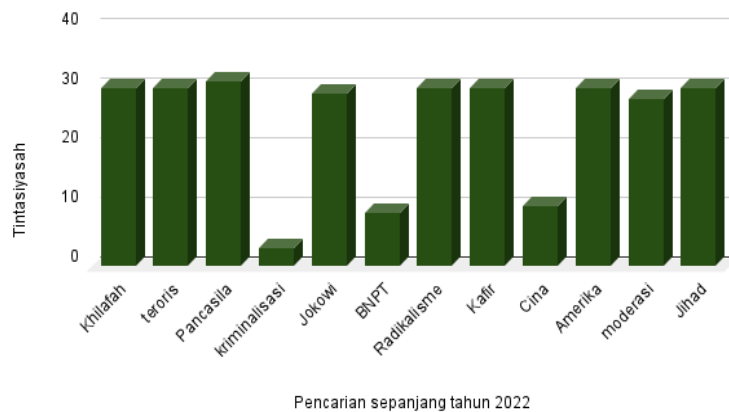
7. *nahimunkar.org*

Muatan artikel yang ditampilkan dalam nahimunkar.org didominasi provokatif. Segala bentuk kebijakan pemerintah, selalu dibuat narasi

Narasi yang dibangun oleh muslimahtimes.com lebih ke ranah muslimah dan politik. Motto yang dibawa oleh website ini yakni 'Dari dan

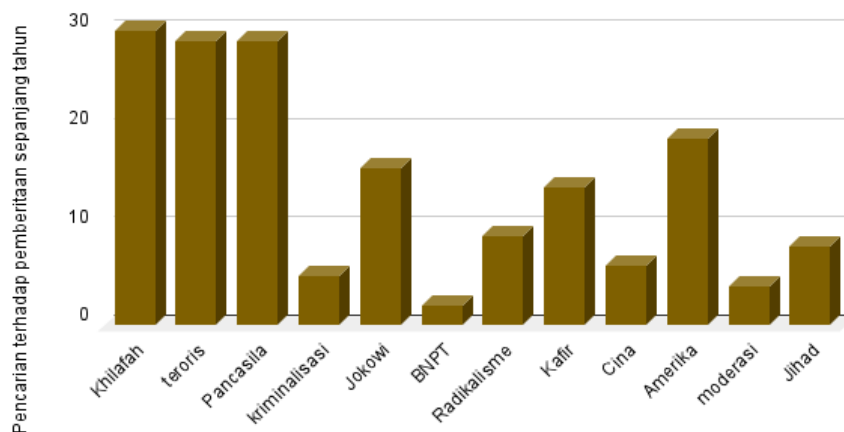
media memiliki fokus narasi yang berbeda-beda. Sekalipun 12 kata kunci tersebut ditemukan dalam website-website tersebut, tetapi jumlah pemuatan artikel yang berkaitan dengan masing-masing kata kunci berbeda-beda. Termasuk juga, keterkaitan satu kata kunci dengan kata kunci lainnya. Pencarian terhadap 12 kata kunci ini dilakukan sepanjang tahun 2022, dimulai pada 1 Januari 2022 sampai dengan 28 Desember dalam tintasiyasi.com, misalnya, kata kunci khilafah, teroris, Pancasila, radikalisme, kafir, Amerika dan Jihad mendapatkan porsi yang sangat tinggi dibanding dengan kata kunci yang berkaitan dengan “kriminalisasi ulama” dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Gambar 1. Pencarian Kata Kunci di Media Tintasiyasi.com



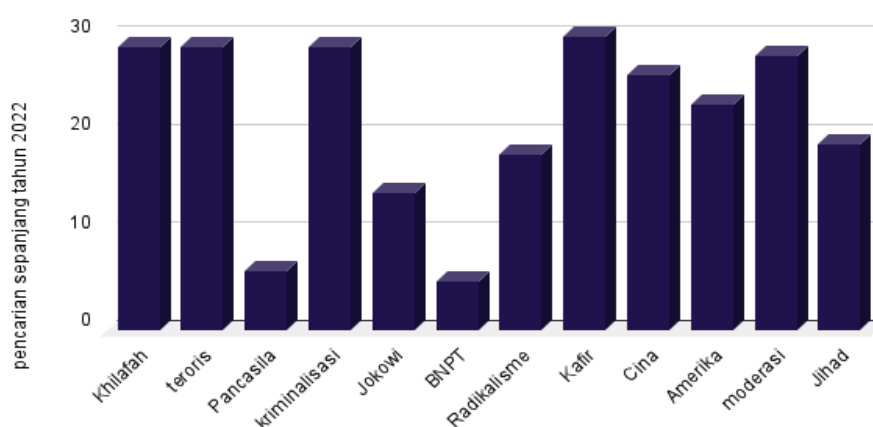
Sementara itu dalam eramuslim, kata kunci “kafir, kriminalisasi ulama, dan BNPT” mendapatkan sorotan tertinggi ketimbang kata kunci lainnya. Pemuatan artikel yang menyinggung soal jihad dan khilafah tidak banyak dilakukan oleh eramuslim.com.

Gambar 2. Pencarian Kata Kunci di Media Eramuslim.com



Sementara itu, pada al-waie.id ditemukan bahwa narasi atau artikel yang berkaitan dengan kata kunci kafir, khilafah, teroris, kriminalisasi ulama, dan moderasi beragama mendapatkan fokus perhatian yang sangat tinggi daripada narasi atau artikel dari kata kunci yang lain. Al-Waie menyinggung soal Pancasila dan BNPT terbilang sangat sedikit. Demikian juga dengan suaraislam.id, artikel atau narasi yang berkaitan dengan kata kunci “khilafah, teroris dan Pancasila” mendapatkan sorotan paling tinggi ketimbang artikel yang berkaitan dengan kata kunci lainnya. BNPT, moderasi beragama, dan kriminalisasi ulama mendapatkan sorotan terkecil dibanding dengan yang lain.

Gambar 3. Pencarian Kata Kunci di Media Al Wafie.id



Lima Narasi Kunci

Setelah melakukan kajian kuantitatif terkait dengan narasi dari masing-masing media tersebut, Islamina kemudian melakukan analisis kualitatif berdasarkan kata kunci - kata kunci. Dalam melakukan analisis kualitatif ini, satu kata kunci bisa berdiri sendiri, dan sering kali saling terkait satu dengan yang lain. Misalnya, kata kunci “kriminalisasi ulama” yang sangat dekat dengan kata kunci “Jokowi” karena Jokowi selaku presiden tertuduh sebagai pelaku kriminalisasi ulama. Demikian juga, kata kunci “Jihad, khilafah, dan Pancasila” yang saling terkait satu dengan yang lain.

Untuk itu, Islamina memiliki narasi kunci yang dilakukan oleh website-website tersebut. Narasi kunci ini berkaitan dengan lima indikator radikalisme-terorisme yang telah disebutkan di atas. Dengan berfokus pada lima indikator tersebut, maka angka-angka kuantitatif di masing-masing media tidak menjadi perhatian. Artinya, satu kata kunci tertentu, misalnya, kurang mendapatkan sorotan ketimbang kata kunci lainnya,

tetap menjadi bahan kajian sejauh berkaitan dengan narasi utama dari lima indikator tersebut.

1. Hanya Khilafah, Bukan Pancasila-Demokrasi

Ulasan tentang khilafah dalam tintasiyasi.com beririsan dengan pembahasan tentang Pancasila. Penyebutan kata Pancasila dihadirkan untuk dikritik dan ditolak, dan khilafah dihadirkan untuk dibela dan dipromosikan. Ada beberapa artikel menarik yang diturunkan oleh tintasiyasi.com, seperti “Pancasila 404 Not Found? Analisis: Jadikan Ideologi Langit sebagai Pemandu Hidup”, “Ketika Usulkan Lima Asas Pancasila, Bung Karno Akui Terinspirasi dari Tokoh Freemasonry”, “Khilafah Harga Hidup, Bukan Harga Mati”, “Prof. Suteki: Layakkah Kita Mengkriminalisasi Khilafah?”, “Khilafah Ajaran Islam, Mengapa Terus Dikriminalisasi?”, “Sistem Pemerintahan Islam Hanyalah Khilafah, Bukan yang Lain!”, “Hanya Khilafah yang Bisa Menjaga Akidah Umat Islam”, dan “101 Tahun Tanpa Khilafah”.

Al-waie menurunkan sejumlah artikel yang berkaitan dengan khilafah seperti “Khilafah: Negara Ri'âyah, Bukan Jibâyah”, “Inilah Sistem Baku Khilafah”, “Khilafah: Kewajiban dan Kebutuhan”, “Khilafah: Pengendali dan Perisai Informasi”, “Pengantar [101 Tahun Tanpa Khilafah]”, dan lain sebagainya. Sementara itu, suaraislam.id menurunkan sejumlah artikel yang berjudul “Khilafah, Mungkinkah?”, “Tolak Khilafah sebagai Solusi, Sekretaris LPOI: Mereka Jelas-Jelas Musuh Agama dan Negara”, “Hoaks Video Eksekusi Penyebar Khilafah di Arab Saudi”, dan lain sebagainya.

Sementara itu, mediaumat.id menurut beberapa judul artikel, seperti “Hanya Khilafah yang Dapat Mewujudkan Perubahan Nyata”, “Runtuhnya Khilafah: Ada Pengkhianat dan Jauhnya Umat dari Syariat” “Dalil-Dalil Wajibnya Khilafah”, “LBH Pelita Umat: Jangan Takut Mendakwahkan Khilafah”, “Akar Kebencian kepada Khilafah Datang dari Barat”, “Pakar: Hanya Khilafah yang Bisa Kelola Negara Tanpa Pajak”, dan lain sebagainya.

Terkait dengan khilafah ini, narasi yang dihembuskan oleh media-media tersebut bukan saja bicara konsepsi-konsepsi tentang khilafah, melainkan juga kewajiban bagi setiap umat Islam untuk menegakkan khilafah dengan menolak Pancasila. Tintasiyasi.com, misalnya, mengajak untuk menolak Pancasila karena ia merupakan ideologi buatan manusia itu berpotensi *dying* hingga *the end*. Karena itu, ia menawarkan Islam sebagai ideologi negara. Tintasiyasi.com menulis “Tanpa khilafah, umat Islam terbelenggu dalam kubangan sistem hukum kufur. Hidup di bawah nasionalisme sempit

yang memecah belah persatuan umat. Tanpa khilafah, kaum Muslim berada dalam bayang-bayang islamofobia. Tanpa khilafah, umat Islam terkungkung dalam liberalisme yang menuhankan kebebasan tiada batas. Liberalisme terus berusaha merusak kaum Muslim dengan serangan pemikiran yang melumpuhkan pilar-pilar fundamental Islam. Yang halal jadi haram dan haram jadi halal”

Mediaumat.id menurunkan artikel dari Shiddiq al-Jawi yang mengulas dalil-dalil kewajiban khilafah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadist maupun kesejarahan Islam. Karena wajib, maka setiap muslim diminta untuk tidak takut mendakwahkan khilafah. Terlebih, kebencian terhadap khilafah ini bersumber dari Barat yang dianggap musuh utama umat Islam. Tak hanya itu, mediaumat.id juga menyuguhkan artikel dampak positif jika khilafah ditegakkan, seperti hanya khilafah yang bisa mengelola negara tanpa pajak.

Narasi khilafah dengan melakukan penolakan terhadap Pancasila bukan saja masuk dalam kategori radikal, tetapi dapat divonis sebagai makar karena menolak Pancasila dengan ideologi negara Republik Indonesia. Narasi ini sangat berbahaya, terutama jika melihat hasil survei yang ada.

Survei LSI-Denny JA tahun 2018 menemukan adanya peningkatan persentase orang yang bermigrasi dari ideologi Pancasila menuju NKRI bersyariah. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro-Pancasila sebanyak 85,2%, pada 2010 (lima tahun kemudian) angkanya mengalami penurunan menjadi 81,7%. Pada tahun 2015, angkanya semakin menurun menjadi 79,4% dan bahkan pada tahun 2018 menjadi 75,3%. Dengan kata lain, dalam kurun waktu 13 tahun, publik yang pro Pancasila menurun 10%. Di kalangan muslim pun mengalami trend yang sama. Pada tahun 2005, warga muslim yang pro-Pancasila mencapai 85,6%, pada 2010 mencapai 81,8%, pada 2015 mencapai 79,1% dan pada tahun 2018 mencapai 74%.

Sebenarnya, umat Islam terikat dengan kesepakatan. Bangsa Indonesia, termasuk umat Islam telah bersepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tak hanya terikat dengan kesepakatan, kandungan dari masing-masing sila dalam Pancasila bukan saja tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam (Muhadjir, 2021).

Sebagian besar umat Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Ijabi dan Mathla'ul Anwar Menes, bentuk NKRI dengan asas Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika adalah sudah final dan ideal untuk

mewadahi keragaman bangsa Indonesia ini. Terlebih, organisasi-organisasi ini meyakini bahwa NKRI, dan UUD 1945 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, Islam baik yang termaktub dalam ayat al-Qur'an maupun hadist justru memerintahkan umatnya untuk mencintai tanah airnya (nasionalisme), dan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila mendapat justifikasi dari al-Qur'an seperti sila pertama yang berarti tauhid.

2. Anti Moderasi Beragama

Tintasiyasi.com memberikan narasi negatif terkait dengan moderasi beragama. Ia menurunkan sejumlah artikel dengan judul-judul negatif, seperti “moderasi beragama langgengkan kekerasan seksual”, “Nativisasi dan Moderasi Islam: Upaya Sekularisasi Bumi Nusantara”, “Toleransi Kebablasan ala Moderasi”, “Awat Bahaya Moderasi Beragama, Pegiat Gender Menggerus Generasi Muda”, “HRC: Penista Agama Muncul Akibat Moderasi Beragama dan Liberalisme”, “Istilah Moderasi Beragama Berasal dari RAND Corporation, bukan Turast Ulama”, “Tolak Moderasi Beragama Berkedok Toleransi”, dan “Moderasi Beragama, Upaya Menghambat Kebangkitan Islam Kaffah”.

Melalui artikel-artikel yang diterbitkan oleh tintasiyasi, moderasi beragama dipandang sebagai konsep yang tidak ada rujukannya dalam Islam. Alih-alih bersumber pada *turast* ulama, moderasi beragama dituding berlawanan dengan Islam itu sendiri. Bahkan, gagasan dan gerakan moderasi beragama diyakini sebagai upaya untuk mengecilkan peran Islam dengan cara membangkitkan budaya pra-Islam. Ia menulis “proyek moderasi beragama saat ini sebenarnya merupakan upaya agar umat Islam menjalankan kehidupan Islam versi Barat”. Moderasi beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dinilai menghambat kebangkitan Islam, penghalang dakwah Islam, karena itu moderasi beragama ini harus ditolak, harus dibuang jauh-jauh karena merupakan racun.

Dalam eramuslim.com diturunkan artikel yang berjudul “Batik Moderasi Kesesatan”, “mengapa harus ribut moderasi” dan “post-truth: era kebohongan”, yang ketiganya ditulis oleh M Rizal Fadillah, yang identitasnya ditulis Pemerhati politik dan kebangsaan. Eramuslim memberikan kritik terhadap kebijakan Menteri Agama “Surat Edaran No 28 tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Kementerian Agama tanggal 19 Oktober 2022”. Batik tersebut dinilai sebagai sinkretisme karena mencantumkan simbol agama lain.

Sementara itu, pada al-waie diturunkan sejumlah artikel, seperti yang berjudul, “Anomali Moderasi Beragama”, “Tadjid ad-Din vs Moderasi Beragama”, “Serangan masif terhadap Islam”, dan “Liberalisasi di Ranah Pendidikan”. Bagi al-Waie, gagasan moderasi beragama dinilai sebagai anomali jika dianggap sebagai hal yang bisa mengatasi islamphobia.

Narasi yang dibangun jelas mencakup indikator radikalisme yang tidak mau menerima pendapat pihak lain dan cenderung eksklusif dalam menyampaikan narasi tentang Khilafah. Selain itu narasi yang dikembangkan juga berpotensi mengandung unsur klaim kebenaran seperti menuduh bahwa moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kemenag sebagai upaya menjalankan Islam versi Barat dan bahkan dituding berlawanan dari prinsip Islam itu sendiri.

Propaganda utamanya tidak jauh berbeda dengan isu-isu lain yang dibicarakan, yaitu menyatakan bahwa Islam adalah solusi dari segala permasalahan meskipun tidak memberikan penjelasan secara riil. Padahal faktanya dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak dibicarakan secara tekstual atas masalah tersebut. Misalnya seperti Pancasila, moderasi beragama, demokrasi dan sejenisnya. Justru secara esensial isu-isu yang diklaim sebagai produk bukan Islam dibicarakan oleh Al-Qur’an.

Moderasi beragama sebenarnya bukan konsep yang asing bagi umat Islam. Konsep-konsep moderasi beragama bukan saja sesuai dengan ajaran Islam, tetapi dinukil langsung dari al-Qur’an dan hadist. Moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Kalau dianalogikan, moderasi adalah ibarat gerak dari pinggir yang selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), sedangkan ekstremisme adalah gerak sebaliknya menjauhi pusat atau sumbu, menuju sisi terluar dan ekstrem (*centrifugal*). Ibarat bandul jam, ada gerak yang dinamis, tidak berhenti di satu sisi luar secara ekstrem, melainkan bergerak menuju ke tengah-tengah. Jika merujuk pada pengertian di atas, karakteristik dasar Islam itu sendiri bersifat moderat, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah 143 dan beberapa ayat-ayat lain dan hadist nabi. Menurut Quraish Shihab, moderasi (*wasathiyah*) mengandung pilar-pilar penting: 1) keadilan, 2) Keseimbangan, dan 3) toleransi.

Afrizal Nur dan Mukhlis menyebut 9 ciri-ciri wasathiyah. 1) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrath (berlebih-lebihan dalam beragama) dan tafriith (mengurangi ajaran agama), 2) *Tawazun*

(berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira, (penyimpangan,) dan ikhtilaf (perbedaan). 3) *I'tidāl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. 4) *Tasamub* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. 5) *Musawab* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang. 6) *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. 7) *Isblab* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan). 8) *Aulanijah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. 9) *Tathammur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik (Nur, Afrizal Mukhlis, 2015).

3. Deradikalisme Sebagai Pembungkaman

Mediaumat.id menurunkan sejumlah artikel yang berkaitan dengan kata kunci radikalisme. Beberapa di antaranya adalah “Pakar Hukum Pidana: Terorisme dan Radikalisme Hanyalah Komoditas”, “Berasal dari Epistemologi Barat, Terorisme dan Radikalisme Dikaitkan dengan Agama”, “Label Radikal, Modus Baru Penjajahan yang Bekerja Sama dengan Oligarki”, “Prof. Suteki: Pemerintah Harus Lebih Berhati-hati Menyematkan Narasi Radikalisme”, dan lain sebagainya.

Sementara tintasiyasi.com menurunkan sejumlah artikel, di antaranya “Radikalisme, Propaganda Menghadang Kebangkitan Islam”, “Radikalisme Kampus: Alat Politik Bungkam Suara Kritis”, “Tuduhan Radikalisme kepada Tokoh Agama”, “Radikal Radikul Kembali Muncul: Inikah Politik Kambing Hitam di Tengah Hiruk-pikuk Pemindahan IKN?”, dan lain-lain.

Penangkapan Bahar bin Smith oleh Polisi karena kasus ujaran kebencian disikapi oleh TintaSiyasi.com sebagai bentuk kriminalisasi terhadap ulama. Dalam artikel yang

dimuat pada bulan Januari dengan judul, “Deradikalisme sebagai Pembungkaman” terdapat kalimat seperti ini, “Tentu hal ini menjadi tidak asing, karena banyak ulama-ulama dan juga aktivis Muslim yang menyuarakan kebenaran justru ditangkap karena diduga menyebarkan ujaran kebencian. Sebelumnya, Gus Nur yang ditangkap karena ujaran kebencian, Habib Rizieq Shihab yang juga ditangkap karena melanggar protokol kesehatan yang hal seperti itu juga dilakukan oleh para pejabat.”

Narasi tersebut digunakan untuk men-framing langkah polisi yang menangkap beberapa ulama dari kalangan mereka sebagai upaya diskriminasi terhadap Islam. Sebagai argumen artikel tersebut juga memaparkan beberapa pelaku yang dianggap melakukan tindakan yang sama namun tidak tersentuh dengan hukum. Seperti Ade Armando yang mengatakan bahwa azan itu tidak suci, azan hanya panggilan salat. Abu Janda yang mengatakan bahwa teroris punya agama dan agamanya adalah Islam, sampai KSAD Jenderal Dudung yang pernah mengatakan jika Tuhan kita bukan orang Arab sehingga tidak perlu doa dengan menggunakan bahasa Arab. Di samping juga pernah mengatakan jika belajar Islam tidak perlu mendalam.

Berdasarkan bukti-bukti demikian yang dipaparkan ada tiga pertanyaan yang diajukan: kenapa mereka tidak disebut intoleran? kenapa mereka tidak diproses hukum secara cepat seperti yang terjadi pada para ulama? bukankah memuhasabahi pemerintah adalah bentuk cinta bukan aksi intoleran? Tiga pertanyaan tersebut diajukan untuk memperkuat tuduhan bahwa semua itu merupakan program deradikalisasi pemerintah, mendiskriminasi ajaran agama dan menangkap para kiai atas tuduhan terorisme tanpa ada dalih yang mendasar.

Propaganda yang dibangun sama dengan narasi lain bahwa justru para kiai, ulama yang ditangkap sedang menyampaikan kebenaran agama, dan apakah Allah, Tuhan Yang Maha Agung patut dihinakan oleh manusia? Propaganda yang dibangun berikutnya memberikan penegasan bahwa tindakan diskriminasi tersebut merupakan dampak dari sistem demokrasi sekuler, produk dari akal manusia yang sangat berlawanan dengan aturan Islam.

4. Kriminalisasi Ulama

Narasi yang gencar dibangun oleh TintaSiyasi.com ialah berkaitan dengan kriminalisasi terhadap ulama. Seperti yang termuat dalam artikel yang berjudul, “Ketum KPAU: Ngawur! Jika Kriminalisasi Ulama Dikaitkan dengan Khilafahisasi.” Dengan tegas artikel tersebut memuat argumen yang disampaikan oleh Ketua Umum Koalisi

Persaudaraan dan Advokasi Umat yang diramu dari channel youtube. Artikel tersebut merespon atas penangkapan beberapa tokoh mereka seperti Ahmad Okbah, Munarman, Anung Alhamat dan Zain An Najjah. Menurutnya penangkapan atas segala yang berkaitan dengan khilafah, daulah atau penggunaan istilah baiat merupakan tindakan ngawur dan tidak tepat jika dikaitkan dengan terorisme.

Artikel tersebut juga men-*Framing* penangkapan terhadap orang-orang yang telah disebutkan di atas tadi dinilai janggal sebab tidak ada pemanggilan dan tidak ada alasan yang mendasar, padahal mereka hanya aktivis dakwah. Sedangkan kelompok JI (Jamaah Islamiyah) yang dituduhkan kepada mereka tidak jelas terkait kesalahannya. Padahal segala yang berkaitan dengan JI langsung disebut teroris. Artikel tersebut juga membandingkan dengan beberapa kelompok seperti kader PDIP yang dengan jelas merugikan negara dan masyarakat, tetapi tidak ada upaya penangkapan seperti yang dialami oleh kelompok JI.

Adapun propaganda yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan isu-isu lain, yaitu JI dan *daulah khilafah* yang ditawarkan keduanya merupakan ajaran Islam. Sehingga seolah hendak menegaskan bahwa penangkapan terhadap siapa pun yang berafiliasi terhadap JI dan pejuang khilafah serta jihad merupakan upaya mendiskreditkan umat Islam.

Dikaitkan dengan tiga indikator radikalisme narasi yang dikembangkan cenderung eksklusif, satu arah dan cara pandang yang fanatik terhadap khilafah. Fakta itu bisa merujuk pada semua gagasan dalam narasi yang dikembangkan serta pada propaganda kampanye khilafah sebagai ajaran Islam. Artikel serupa yang diterjunkan ada yang berjudul, “Tanggapi Kriminalisasi Ulama, Advokat: Mainnya Brutal,” selain itu terdapat artikel yang menyoal kriminalisasi terhadap ajaran khilafah dengan judul, “Kriminalisasi Khilafahisme dan Radikalisme: Inikah Upaya untuk Memerangi Ajaran Islam dan Kebebasan Berpendapat,” terdapat artikel yang sama dengan judul, “Adakah Kriminalisasi di Tengah Legalitas Mendakwahkan Khilafah sebagai Ajaran Islam?”

5. Kritik Terhadap BNPT

Lembaga pemerintah yang menjadi sasaran utama dari media yang memuat konten-konten radikalisme adalah BNPT. Temuan survei sepanjang tahun 2022 terdapat angka yang cukup tinggi dan hampir selalu dikaitkan dengan isu-isu yang menjadi kontra narasi pada website terkait. Pada artikel yang diterjunkan dengan judul, “Di balik Isu Penceramah Radikal,” BNPT dituding sebagai dalang yang memberikan stigma dan kriteria atas penceramah radikal dengan kategori pertama adalah penceramah yang anti

Pancasila dan pro terhadap ajaran khilafah. Propaganda yang dikembangkan dalam artikel tersebut memberikan pernyataan jika dakwah tentang khilafah adalah kewajiban karena khilafah merupakan ajaran Islam.

Artikel serupa yang dirilis oleh TintaSiyasi.com ada yang berjudul, “Lima Ciri Ngawur Radikal ala BNPT.” Artikel tersebut mempermasalahkan lima pernyataan BNPT yang dituding sangat berlawanan dengan ajaran Islam bahkan dituduh tidak paham agama. Pertama soal pendakwah yang anti Pancasila dan pro khilafah sebagai ciri radikal. Artikel tersebut membantah sebab MUI secara tegas mendukung jika jihad dan khilafah sebagai ajaran Islam.

Kedua, penceramah yang memiliki paham takfiri. Menurutnya dalam Al-Qur’an jelas bahwa selain muslim disebut sebagai kafir. Ketiga, penceramah radikal cirinya anti terhadap pemimpin yang sah. Menurutnya, mengoreksi pemimpin merupakan pesan dari dakwah amar makruf nahi munkar. Keempat, sikap eksklusif. Menurut mereka dalam konteks ibadah umat Islam harus eksklusif. Kelima, tidak hormat budaya. Menurutnya hormat budaya yang bisa mengantarkan pada kekufuran justru dilarang oleh Islam.

Artikel serupa juga diterjunkan dengan judul, “BNPT Melakukan Framing terhadap HTI.” Artikel tersebut digunakan untuk menyerang BNPT atas pernyataannya pada peristiwa perempuan yang menodongkan senjata di hadapan Paspampres di lingkungan Istana Presiden. Dalam artikel tersebut juga disampaikan bahwa BNPT telah secara sembarangan mengaitkan aksi demikian dengan HTI.

Prediksi Narasi Tahun 2023

Merujuk pada geliatnya narasi yang dikembangkan oleh website keislaman yang menjadi objek survei tahun ini, tidak menafikan jika narasi yang dikembangkan pada tahun berikutnya juga bernada sama. Propaganda yang ditawarkan sepertinya sudah menjadi prinsip yang “membantu” dan terpatri kuat sebagai ideologi mereka, sehingga sulit untuk diajak berdialog khususnya terkait dengan konsep jihad dan khilafah.

Temuan menarik, propaganda yang ditawarkan selalu sama untuk menjadikan Islam sebagai solusi atas segala permasalahan namun tidak diberikan bukti riil bagaimana operasionalnya secara praktis. Meskipun demikian propaganda yang jelas-jelas mengandung unsur indikator radikalisme itu selalu disebarkan sebagai respons atas segala isu yang berkembang. Seolah-olah jawaban yang sama itu (dengan menjadikan Islam sebagai solusi melalui sistem khilafah dan jihad) bisa membedah semua permasalahan umat yang muncul dewasa ini.

Indikator radikalisme yang digunakan dalam survei tahun ini bisa jadi mengalami perkembangan atau memperbarui. Misalnya penolakan terhadap Pancasila yang semula masuk pada kategori radikalisme ternyata bisa dipandang sebagai upaya makar karena sudah tidak sepakat dengan suatu perjanjian NKRI dan UUD yang sudah final. Barangkali kasus demikian wajar terjadi dengan lahirnya suatu gaya baru atau metamorfosa dari strategi lama yang tidak lagi relevan. Islamina edisi tahun 2022 pernah merilis hasil riset soal gaya baru pelaku terorisme dari berjamaah hingga berjalan sendiri (lone wolf).

Hasil riset pada narasi-narasi yang dikembangkan di tahun 2022 ini tidak menunjukkan adanya metamorfosis secara strategi sebagai model penyajian narasi. Dilihat dari unsur itu hampir semuanya sama, yang masing-masing tidak lepas dari isu, respon subyektif dan propaganda. Artinya judul dari narasi-narasi yang dirilis seringkali berkaitan dengan isu-isu aktual atau momen yang sedang terjadi pada saat itu juga. Misalnya pada momen Hari Santri, penangkapan beberapa oknum dari kalangan mereka, pidato dari BNPT dan pemerintah yang tidak disepakati.

Lembaga pemerintah yang menjadi sasaran “gebuk” media-media ini adalah BNPT yang posisinya sebagai garda depan melawan bentuk radikalisme dan terorisme. Beberapa narasi yang dikembangkan, BNPT bahkan dituding tidak paham dengan agama dan ajaran Islam, sebab menolak khilafah dan jihad yang jelas-jelas merupakan ajaran Islam.

Fakta-fakta di atas bisa menjadi cermin untuk tahun 2023 terkait narasi-narasi yang akan berkembang. Bisa jadi akan lebih geliat lagi jika mempertimbangkan momen tahun depan lebih banyak terjadi sebagai detik-detik menjelang Pemilu. Berkaca dari tahun 2018 yang merupakan satu tahun menjelang Pemilu, survei yang dilakukan oleh Denny JA terkait minat NKRI bersyariah dan menolak Pancasila mengalami peningkatan. Apalagi jika media-media keislaman tersebut menjadi “anak asuh” dari Partai Politik tertentu sehingga menjadi alat kampanye untuk menjatuhkan lawan politik atas nama Islam.

KESIMPULAN

Hasil survei pada narasi-narasi media keislaman yang dikembangkan sepanjang tahun 2022 dengan menggunakan indikator radikalisme menemukan bukti yang masih tinggi. Beberapa narasi yang dikembangkan menjadi kecenderungan masing-masing

media. Artinya tidak semua media keislaman men-framing isu khilafah secara masif. Fakta ini ditemukan berdasarkan pencarian melalui kata kunci pada masing-masing website yang menjadi objek riset. Misalnya pada media eramuslim.com narasi yang men-framing isu khilafah prosentasenya masih rendah jika dibanding dengan narasi-narasi lain.

Meskipun demikian survei ini mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa narasi yang memuat tentang khilafah, jihad, sistem demokrasi sebagai sistem sekuler, anti terhadap Pancasila, moderasi beragama, teroris, radikalisme, kafir, Amerika, dan Cina masih cukup tinggi. Dan pada ujungnya dari semua narasi yang direspons selalu membawa propaganda khilafah dan Islam sebagai solusinya.

Rekomendasi penting untuk pemerintah harus meningkatkan langkah-langkah strategis melawan berkembangnya narasi yang membahayakan seperti ini. Setidaknya ada dua strategi yang bisa dikembangkan sebagai suatu pendekatan dan upaya preventif. Pertama dengan menggunakan *soft approach* (pendekatan halus) melakukan kontra narasi dari media-media keislaman yang radikal. Kedua dengan menggunakan *hard approach* melalui upaya-upaya advokasi dan hukum yang berlaku. Catatan penting yang perlu dipertimbangkan adalah melibatkan masyarakat akar rumput untuk memiliki wawasan terkait indikasi adanya radikalisme. Sebab justru ada di tangan merekalah suatu paham radikal akan menjadi aksi radikal dan demikian juga sebaliknya, paham atas NKRI yang baik akan menjadi aksi nyata jika sudah diterjunkan di akar rumput baik yang ada di dunia nyata maupun dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Allely, C. S., & Faccini, L. (2017). "Path to intended violence" model to understand mass violence in the case of Elliot Rodger. *Aggression and Violent Behavior*, 37, 201-209.
- Azra, A. (2018). Radikalisme di Kampus Berkembang Karena Tak Ada Gerakan Tandingan. Retrieved from tirta.id website: <https://tirta.id/radikalisme-di-kampus-berkembang-karena-tak-ada-gerakan-tandingan-cPqQ>
- Azra, A., Kuswaya, A., Abbas, A. F., & Darraz, M. A. (2017). *Azyumardi Azra, Adang Kuswaya, Afifi Fauzi Abbas, Mubammad Abdullah Darraz*. Bandung: Mizan.
- Berntzen, L. E., & Sandberg, S. (2014). The collective nature of lone wolf terrorism: Anders Behring Breivik and the anti-Islamic social movement. *Terrorism and Political Violence*, 26(5), 759-77
- Bruce Hoffman.(2006). *Inside Terrorism*. New York, Columbia University Press,

- Catharina, S. (2022). Terrorists Need an Ideology. Retrieved from E-International Relations website: <https://www.e-ir.info/2022/06/15/terrorists-need-an-ideology/>
Catharina Savelkoul, Jun 15 2022
- Coccia, M., Benati, I. (2018). Comparative Studies. In: Farazmand, A. (eds) Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_1197-1
- Corner, E., Gill, P. (2020) Psychological Distress, Terrorist Involvement and Disengagement from Terrorism: A Sequence Analysis Approach. *J Quant Criminol* 36, 499–526. <https://doi.org/10.1007/s10940-019-09420-1> Institute for Economics & Peace.
- Drake, C. J. (1998). The role of ideology in terrorists' target selection. *Terrorism and Political Violence*, 10(2), 53-85
- Gazali, H., Anggraeni, D., & Eit Ahmed, M. (2023). Salafi-Jihadist Movements and Ideology in Educational Institutions Exploring the Nexus with Religious Moderation. *Edukasia Islamika*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/jei.v8i1.7658>
- GTI. (2022). *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*, Sydney. Retrieved from <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2022/03/GTI-2022-web-09062022.pdf>
- Heywood, A. (2017). *Political ideologies: An introduction*. Pearson: Macmillan International Higher Education.
- Hilary, McLellan (1996), 'Being Digital': Implications for Education, *Educational Technology Publications* [Vol. 36, No. 6 \(November-December 1996\)](#), pp. 5-20
- Km, U. T. A. J. S. H. (2020). *Introducing Netnographic Research Methods For Communication Lecturers And Students*. 8.
- McLellan, D. (1995). Unto Caesar: The Political Relevance of Christianity. *Pro Ecclesia*, 4(2), 250–251. <https://doi.org/10.1177/106385129500400217>
- Neumann, P. R., & Smith, M. L. R. (2007). *The strategy of terrorism: How it works, and why it fails*. Routledge.
- Nur, Afrizal Mukhlis, M. (2015). Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran; (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrîr Wa At-Tanwîr Dan Aisar At-Tafâsîr). *An Nur*, 4(2).

